



Aset jadi Sorotan

SUNGAI RAYA—Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dalam Sidang Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi yang dipimpin wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Usman, tujuh fraksi yang hadir memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Senin (29/7).

Juru Bicara Fraksi PAN, Raqib, mengatakan bahwa fraksinya menyorot tentang aset, yang menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dapat mengidentifikasi dan pendataan aset daerah. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan, guna menyelamatkan aset yang dimiliki Pemkab.

"Kita juga berharap kepada Pemkab untuk dapat membentuk tim inventarisir dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, agar tidak ada lagi permasalahan aset yang menjadi temuan BPK," katanya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Soeprapto, menegaskan bahwa fraksinya berharap agar Pemkab segera melakukan perbaikan terhadap keuangan yang akuntabilitas dan transparan, serta menjadikan laporan pansus sebagai bahan referensi.

Berbeda pula yang disampaikan Fraksi DKDS melalui juru bicara Zulkarnaen. Mereka meminta agar Bupati dapat memberikan arahan dan motivasi ke setiap SKPD, terhadap hasil temuan dari BPK, dengan opini wajar dengan pengecualian, agar ke depan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. "Kami menyarankan kebijakan dan penatausahaan persediaan yang ada di SKPD. Bagi SKPD yang tidak melaksanakan diberi sanksi," tegas Zulkarnaen.

Jubir Fraksi Demokrat, Bambang Sridadi, menegaskan tentang infrastruktur pendidikan yang harus mengacu pada kebutuhan sekolah setempat. Kemudian, dia menambahkan, harus disesuaikan pula dengan kebutuhan yang diusulkan oleh kepala sekolah, sehingga memenuhi azas manfaat dan skala prioritas.

"Termasuk juga pembangunan jalan di ruas tertentu, harus menyesuaikan dengan kondisi setempat. Di lokasi tergenang, perlu ditingkatkan dengan betonisasi. Begitu pula sebaliknya, cukup hanya dengan penegerasan," sarannya.

Tak jauh berbeda dengan lainnya, Fraksi PDIP melalui juru bicara mereka, Abdurrasyid, meminta agar Pemkab melakukan kerjasama dengan pihak luar, sehingga dapat dilakukan inventarisasi, agar tidak ada lagi temuan BPK mengenai aset.

Lain halnya Fraksi PPP. Mereka memberikan catatan mengenai e-KTP yang baru tercapai 75 persen. "Pemkab harus lebih proaktif menyosialisasikan di seluruh lapisan masyarakat, agar realisasinya dapat tercapai tepat pada waktunya," terang Akhmadsyah, juru bicara fraksi.

Sementara Fraksi RKNR menyorot tentang PAD 2012 yang mengalami penurunan 0,74 persen, atau hanya terealisasi Rp55,164 miliar dari target Rp58,903 miliar. "Karena itu eksekutif harus memaksimalkan wajib pajak, seperti yang tertuang dalam Perda, karena pembayaran pajak sifatnya adalah mengikat dan memaksa semua orang. Selain itu, Pemkab juga harus mengoptimalkan sumber daya daerah lainnya untuk peningkatan PAD," tegas juru bicara Fraksi RKNR, Joko Triono. (adg)